

PEMBENTUKAN MODAL DALAM
PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA
SEDANG BERKEMBANG



Oleh,

Dra. Sri Ulfa Sentosa

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG | |
| DITERIMA TGL | APRIL 1991 |
| SUMBER HARGA | HD |
| KOLEKSI | K.K.I ... |
| NO INVENTARIS | 720/Hd/91-p0 ⁽²⁾ |
| CALL NO | 332.014. Sri-p0 |

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

JURUSAN PENDIDIKAN DUNIA USAHA
FPIPS IKIP PADANG

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pandangan Ahli Ekonomi Mengenai Pembentukan Modal | 1 |
| B. Arti Pembentukan Modal | 4 |
| C. Peranan Istimewa Dari Modal Dalam Pembangunan | 6 |
| BAB II. SUMBER-SUMBER PEMBENTUKAN MODAL | 8 |
| A. Sumber Pembentukan Modal Dari Dalam Negeri | 8 |
| B. Sumber Pembentukan Modal Dari Luar Negeri | 30 |
| BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMBENTUKAN MODAL DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG | 43 |
| A. Terdapatnya Lingkaran Perangkap Kemiskinan (The Vicious Circles)..... | 43 |
| B. Kekurangan Wiraswasta | 48 |
| C. Masalah Kependudukan | 50 |
| D. Kekurangan Overhead Ekonomi..... | 52 |
| E. Tidak Meratanya Distribusi Pendapatan.. | 53 |
| F. Kekurangan Peralatan Modal | 54 |
| G. Pasar Sempit | 55 |
| H. Kekurangan Lembaga Keuangan | 55 |
| I. Keterbelakangan Ekonomi | 56 |
| J. Kekurangan Dalam Sumber-Sumber Tabung- an | 56 |

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Pandangan Ahli Ekonomi Mengenai Pembentukan Modal

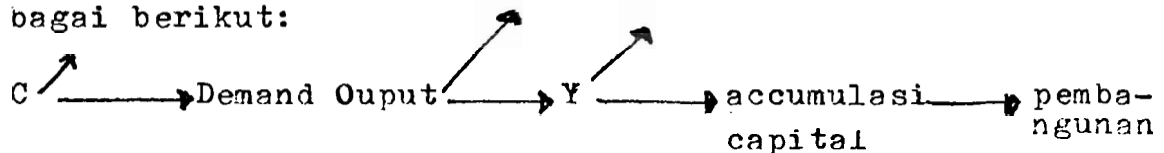
Hampir semua ahli ekonomi, mulai dari ekonom klasik sampai dengan Pos Keynesian menekankan pentingnya pembentukan modal (Capital Formation) untuk melaksanakan pembangunan.

Dalam teori klasik, pembentukan modal dipandang sebagai kunci ke arah kemajuan. Karena itu para ekonom klasik menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah besar, dan hanya pemilik modal dan tanah merupakan orang yang dianggap mampu untuk menabung, sedangkan kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan kebutuhan hidup minimal (subsistence).

Sama halnya dengan ekonom klasik, Schumpeter dan J. M. Keynes serta Harrod-Domard, juga menekankan pentingnya pembentukan modal untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Schumpeter penanaman modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu penanaman modal otonomi (autonomous investment) dan penanaman modal terpengaruh (induced investment). Penanaman modal otonomi ditentukan oleh perkembangan jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam yang baru dan kemajuan teknologi. Berarti penanaman modal otonomi adalah penanaman modal untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Sedangkan penanaman modal ter-

pengaruh (induced investment) adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan atau keuntungan-keuntungan dari perusahaan. Penanaman-penanaman modal di atas merupakan faktor penentu pertumbuhan.

J. M. Keynes, memandang pembentukan modal itu sebagai suatu tindakan untuk memperbesar pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, dengan makin besarnya jumlah pembentukan modal maka akan memperbesar kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilukiskan sebagai berikut:



Lebih dalam lagi adalah teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (aliran Post Keynesian). Menurut Harrod-Domard, pembentukan modal merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan yang mantap (Steady Growth), yaitu apabila:

$$\Delta Y_s = \Delta Y_d$$

dimana, ΔY_s = Pertambahan kapasitas yang efektif dari alat-alat modal yang baru.

ΔY_d = Pertambahan dalam pendapatan nasional

Selain dari ekonom-ekonom di atas, Nurkse juga mengemukakan pentingnya pembentukan modal sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran perangkap kemiskinan di negara-negara sedang berkembang dapat diungkit melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendah-

nya tingkat pendapatan negara-negara sedang berkembang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Lewat pembentukan modal ini, persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan akan meningkat. Skala produksi meluas, overhead ekonomi dan sosial akan tercipta.

Sehubungan dengan itu, pembentukan modal akan membawa kepada pemamfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Pembentukan modal akan menghasilkan kenaikan output nasional, pendapatan dan pekerjaan dan mencegah masalah inflasi dan neraca pembayaran serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri dan sebagainya.

Pendapat-pendapat di atas semuanya menekankan sangat pentingnya peranan pembentukan modal dalam rangka melaksanakan pembangunan. Akan tetapi dalam dua dasawarsa belakangan ini telah makin disadari oleh ahli ekonomi ataupun para pelaksana pembangunan, bahwa tersedianya modal yang banyak belumlah merupakan syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya tenaga wiraswasta yang cukup, sistim pemerintahan yang efisien, besarnya kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi yang lebih modern dan corak sikap masyarakat, memegang peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam menciptakan pembangunan.

Namun demikian, walaupun telah diakui bahwa peranan modal dalam pembangunan tidaklah sepenting seperti

yang pada mulanya dianggap oleh ahli-ahli ekonomi, akan tetapi ahli-ahli ekonomi dan para pelaksana pembangunan tetap yakin bahwa modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan kepada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan. Administrasi pemerintahan yang efisien, modernisasi sektor industri dan pengembangan sektor pertanian memerlukan tenaga administratif, berbagai jenis tenaga ahli, tenaga usahawan dan perkembangan maupun perbaikan berbagai jenis sarana dan prasarana. Pengembangan sistim pendidikan dapat menyediakan berbagai jenis tenaga administratif, tenaga ahli dan tenaga usahawan yang diperlukan. Kesemuanya hanya bisa dilakukan bila tersedia modal yang cukup. Oleh sebab itu pembentukan modal penting dilaksanakan sebagai suatu faktor produksi yang mempunyai kedudukan istimewa dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Arti Pembentukan Modal

Arti pembentukan modal adalah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebahagian saja untuk pembentukan barang modal; yaitu perkakas, alat-alat, mesin, dan fasilitas angkutan, pabrik-pabrik dan perlengkapan lainnya yang dapat dengan cepat meningkatkan mampaat upaya produktif. Jadi pembentukan modal terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar

Jumlah output dikemudian hari.

Investasi produktif ini harus dilengkapi dengan investasi yang bersifat infrastruktur sosial dan ekonomi seperti jalan, listrik, air dan sanitasi, komunikasi dan sebagainya guna menunjang aktifitas perekonomian secara terpadu. Sebagai contoh, investasi seorang petani sayur untuk membeli traktor baru akan meningkatkan peroduksinya namun tanpa fasilitas transport yang memadai guna mengangkut tambahan produksi tersebut ke pasaran maka investasi itu tidak akan menambah produksi pangan nasional.

Selain investasi dana dalam berbagai barang-barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat dan mesin-mesin, investasi dalam barang yang tidak nampak seperti dalam sumberdaya manusia dapat meningkatkan kualitas manusia dan dengan demikian akan menghasilkan efek yang sama terhadap produksi bahkan akan lebih besar lagi dengan bertambahnya jumlah manusia yang berkualitas. Pendidikan formal, kejuruan, program latihan dan pendidikan informal lainnya dapat lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumberdaya lainnya dengan adanya investasi langsung dalam gedung-gedung, peralatan dan material.

Kesemuanya di atas, merupakan bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke arah pembentukan modal. Pembentukan modal akan menambah sumberdaya baru seperti pembukaan tanah-tanah yang semula tidak dipergunakan atau meningkatkan kualitas sumberdaya, misalnya irigasi, pupuk, pestisida dan lain-lainnya. Namun untuk mencapai maksud

tersebut diperlukan pertukaran antara konsumsi sekarang dengan konsumsi dikemudian dalam arti mengurangi konsumsi hari ini untuk dikonsumsi di kemudian hari.

C. Peranan Istimewa Dari Modal Dalam Pembangunan

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu pentingnya pembentukan modal untuk mencapai tujuan pembangunan, maka berikut ini akan dikemukakan secara lebih terperinci peranan istimewa dari modal dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Modal dapat menciptakan perluasan pasar. Ketidak sempurnaan pasar dapat di atasi melalui pembentukan investasi sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi. Dengan demikian pembentukan modal akan memotong lingkaran perangkap kemiskinan (The Vicious Circle), baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan.
2. Pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin dilaksanakan. Di negara-negara sedang berkembang yang berpenduduk banyak, kenaikan output per kapita adalah berkaitan dengan rasio-modal-buruh. Oleh sebab itu dengan adanya pembentukan modal pembangunan menjadi mungkin dilaksanakan, kendati dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
3. Pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri merupakan salah satu cara pemecahan pokok kesulitan dalam neraca pembayaran. Negara-negara sedang berkembang biasanya dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, sebab kebanyakan mereka mengeksport barang-barang

primer seperti bahan mentah dan hasil pertanian dan mengimpor hampir semua jenis barang manufaktur atau setengah manufaktur dan barang modal lainnya. Sehubungan dengan itu, pembentukan modal yang besar akan membantu memecahkan masalah neraca pembayaran.

4. Pembentukan modal dapat mempercepat proses pembangunan nasional.

BAB II

SUMBER-SUMBER PEMBENTUKAN MODAL

Pembentukan modal pada dasarnya menyangkut bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah tabungan nyata, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan dan pada masalah bagaimana caranya menginvestasikan tabungan tersebut.

Di negara-negara sedang berkembang, masalah pembentukan modal akan menyangkut bagaimana caranya untuk meningkatkan kecendrungan penduduk kelompok pendapatan rendah serta bagaimana mempergunakan tabungan uang bagi pembentukan modal.

Selanjutnya, berdasarkan kepada sumber modal yang dapat digunakan untuk pembangunan, usaha pembentukan modal untuk maksud tersebut dapat dibedakan kepada sumber pembentukan modal dalam negeri dan luar negeri. Sumber pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri antara lain berupa tabungan, pajak, anggaran belanja defisit, inflasi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sumber pembentukan modal yang berasal dari luar negeri antara lain berbentuk; bantuan luar negeri, pinjaman dan penanaman modal asing, pembatasan impor barang-barang konsumsi, dan teras of trade yang berat sebelah.

A. Sumber Pembentukan Modal Dari Dalam Negeri

1. Tabungan. Tabungan dapat dibedakan atas tiga sumber yaitu tabungan sukarela masyarakat, tabungan ~~pa-~~

rintah dan tabungan paksa.

a. Tabungan Sukarela Masyarakat (Voluntary Saving)

Yang dimaksud dengan tabungan sukarela Masyarakat adalah bahagian pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bahagian pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan:

- 1). Disimpan saja tanpa digunakan (Hoarding)
- 2). Ditabungkan pada badan-badan keuangan
- 3). Dipinjamkan kepada anggota masyarakat. Lainnya digunakan untuk penanaman modal yang tidak produktif.

Dengan demikian berbagai macam penggunaan ini, akan memberikan akibat yang berbeda kepada usaha untuk menciptakan pembangunan ekonomi.

Tabungan sukarela masyarakat akan memberikan sumbangan kepada usaha pembangunan apabila:

- 1). Para penabung menggunakan tabungan tersebut untuk melaksanakan penanaman modal yang produktif, yaitu penanaman modal yang akan menaikkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam masyarakat.
- 2). Tabungan tersebut dialirkan ke badan-badan keuangan dan selanjutnya badan-badan keuangan tersebut meminjamkannya kepada para pengusaha yang ingin melakukan penanaman modal yang produktif.

Sebaliknya tabungan sukarela masyarakat itu tidak memberikan sumbangan kepada usaha pembangunan apabila:

- 1). Masyarakat menyimpan tabungan yang diciptakannya itu dalam bentuk emas, tanah, bangunan, binatang pe-

liharahan dan emas dan sebagainya.

- 2). Dipinjamkan kepada orang lain, akan tetapi sipeminjam menggunakannya untuk barang yang tidak produktif seperti untuk membiayai perhelatan dan sebagainya.

Dalam teori ekonomi mikro, kita mengenal bahwa terdapat dua tujuan dari pendapatan masyarakat yaitu untuk konsumsi (C) dan untuk ditabung (S). Dengan kata lain $Y = C + S$. Sehubungan dengan itu besar kecilnya tingkat tabungan sukarela masyarakat juga ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita dari masyarakat tersebut. Akan tetapi tingkat pendapatan per kapita bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan besarnya tabungan sukarela masyarakat. Data mengenai tingkat tabungan di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat tingkat tabungan yang berbeda di negara-negara yang tingkat tabungan sama besar (Sukirno, 1985: 353).

Hal di atas membuktikan bahwa di samping pendapatan per kapita, tingkat tabungan ditentukan pula oleh faktor lain, antara lain berupa corak distribusi pendapatan dan besarnya keuntungan sektor perusahaan.

Dalam tabungan sukarela masyarakat perlu dibedakan dua hal berikut:

- 1). Kesanggupan menabung (ability to save)
- 2). kemauan untuk menabung (willingness to save).

Yang dimaksud dengan kesanggupan menabung (tingkat tabungan potensial) adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mengerahkan tabungan dalam negeri. Seperti telah dike-

mukakan terdahulu, hal ini terutama tergantung pada pendapatan per kapita masyarakat, corak distribusi pendapatan dan kesanggupan sektor perusahaan untuk menabung. Sedangkan yang dimaksud dengan kemauan menabung adalah besarnya tabungan yang sebenarnya diciptakan oleh sesuatu masyarakat. Dengan demikian kemauan untuk menabung merupakan tingkat tabungan riil dari sesuatu masyarakat. Kemauan untuk menabung ditentukan oleh tingkat perkembangan badan-badan keuangan yang ada, tingkat bunga yang dibayar oleh badan-badan keuangan atas tabungan yang dilakukan oleh masyarakat, dan sikap masyarakat terhadap kegiatan menabung.

Sehubungan dengan hal itu, penupukan modal melalui tabungan sukarela masyarakat baru akan berhasil apabila ditunjang oleh ke dua faktor tersebut di atas. Selanjutnya tabungan sukarela dapat dihimpun (digalakkan) melalui usaha-usaha berikut:

- 1). Penggalakan tabungan merupakan upaya bersama dalam bentuk penerangan dan pendidikan sosial. Menabung merupakan masalah kebiasaan yang ditanamkan melalui penerangan. Penduduk dapat dibujuk untuk menabung demi kepentingan keluarga mereka, pendidikan anak-anak, untuk membangun rumah atau sebagai jaminan hari tua, sakit atau keadaan darurat lainnya.
- 2). Menerbitkan sertifikat tabungan dalam bentuk surat obligasi pemerintah dan tunjangan pemerintah yang memberikan suku bunga tinggi mungkin juga membantu dalam menggalakan tabungan.

3). Rangsangan yang lebih jauh untuk menabung dapat berupa hadiah bisnis, hadiah undian dan pembebasan pajak bagi pembelian obligasi dan lain sebagainya.

b. Tabungan Pemerintah (Government Saving)

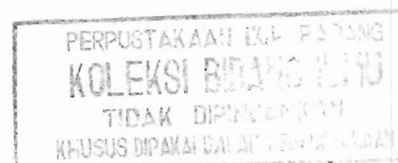
Tabungan pemerintah adalah merupakan kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lainnya setelah pendapatan itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin.

Pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sumber antara lain:

- a. Pajak
- b. Non-pajak
- c. Bantuan program
- d. Bantuan proyek.

Menurut jenisnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1). Pajak langsung (direct taxes). Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima atau kekayaan yang dimiliki, seperti pajak pendapatan rumah tangga, pajak pendapatan perusahaan dan pajak kekayaan.
- 2). Pajak tidak langsung (indirect taxes). Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada para pembeli yang menggunakan barang-barang dan jasa-jasa yang terdapat dalam masyarakat, seperti pajak penjualan, pajak import dan pajak ekspor.



Di negara-negara sedang berkembang, penerimaan pemerintah dari pajak terutama berupa pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1). Sebahagian masyarakat di negara-negara sedang berkembang menerima pendapatan yang sangat rendah sekali dan dengan demikian mempunyai kemampuan yang terbatas pula untuk membayar pajak.
- 2). Adanya kesulitan administratif untuk mengumpulkan pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu para petani, pekerja harian, para pedagang kecil dan sebagainya, yang merupakan bahagian terbesar dari penerima pendapatan di negara-negara sedang berkembang.

Selanjutnya, penerimaan pemerintah dari non pajak adalah semua penerimaan pemerintah yang berasal dari bukan pajak, seperti uang SPP dari sekolah-sekolah dan sebagainya. Sedangkan bantuan program adalah penerimaan pemerintah yang biasanya berasal dari luar negeri yang tujuannya untuk membiayai program-program pemerintah seperti program Keluarga Berencana. Bantuan proyek adalah penerimaan pemerintah yang biasanya berasal dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek, seperti pembustan jembatan-jembatan, irigasi dan lain-lainnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan, maka perlulah dilakukan usaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah dapat ditingkatkan apabila tingkat pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih ce-

pat dari pada pengeluaran rutin pemerintah. Dengan kata lain tingkat pertambahan pendapatan pemerintah lebih besar dari pada tingkat pengeluaran rutin pemerintah. Kebijakanaksanaan meningkatkan pendapatan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menjalankan dua langkah berikut:

- a. Mencari sumber-sumber penerimaan pajak yang baru.
- b. Memperbaiki administrasi pemungutan pajak.

Di negara-negara sedang berkembang masih terdapat kemungkinan untuk menaikan penerimaan pemerintah dari pajak langsung, terutama pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Untuk dapat memungut pajak pendapatan dan pajak kekayaan dengan baik beberapa syarat tertentu harus dipenuhi, yaitu perekonomian harus merupakan ekonomi uang (money economy) perusahaan-perusahaan sudah sedemikian rupa majunya, sehingga memiliki catatan keuangan yang lengkap, tingkat kejujuran dan efisiensi dalam administrasi pajak yang tinggi dan sikap masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga pemungutan pajak atas orang-orang kaya dan orang-orang yang berpengaruh dapat dilakukan (Sukirno, 1985: 358). Di banyak negara-negara sedang berkembang syarat-syarat ini banyak yang belum bisa dipenuhi, sehingga pendapatan pemerintah dari pajak langsung tidak sebesar potensi yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

Selanjutnya, administrasi pemungutan pajak juga dapat memberikan sumbangan yang penting dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Untuk mempertinggi efisiensi administrasi pemungutan pajak, haruslah disesuaikan dengan keadaan setempat. Dalam hal ini perlulah

diadakan koordinasi diantara perumusan struktur pajak dan administrasi pemungutan pajak.

α. Tabungan Paksa (Forced Saving)

Berdasarkan atas namanya saja, jelaslah bahwa tabungan paksa ini pemungutannya kepada masyarakat dilakukan secara paksa. Tabungan paksa ini pernah dilakukan di beberapa negara seperti; Inggris, Uni Sovyet, RRC dan juga Indonesia di masa orde lama.

Ada beberapa cara memungut tabungan paksa sebagai berikut:

- a. Melalui inflasi. Pemungutan tabungan paksa melalui inflasi ini pernah terjadi di Inggris. Pelaksanaan pembangunan di Inggris, dimana tabungan-investasi dijalankan oleh kaum usahawan atas penderitaan orang banyak dengan tabungan paksaan yang secara tidak langsung melalui proses inflasi yang berkali-kali terjadi. Contoh; Sebelum inflasi dengan uang Rp. 1000 dapat diperoleh 4 bungkus barang A, sekarang setelah ada inflasi masih dengan uang Rp. 1000 hanya bisa diperoleh barang A yang sama sebanyak 2 bungkus. Kekurangan yang dua bungkus tadi merupakan keuntungan para usahawan yang diperoleh dengan paksa. Andsikata keuntungan tersebut ditabung maka akan menjadi tabungan paksa.
- b. Melalui pemaksaan oleh negara. Dimana berdasarkan kekuasaan negara yang memaksa sejumlah tenaga manusia untuk bekerja dalam proyek-proyek pembangunan. Selain dari itu dengan kekuasaan negara diadakan pengawasan

dan campur tangan langsung dalam kehidupan orang se-orang, yaitu mengenai tingkat konsumsi yang diperbolehkan. Jadi tabungan dan investasi dijalankan oleh kekuasaan negara atas penderitaan rakyat banyak yang sering harus mengurangi tingkat konsumsi di bawah konsumsi minimal. Tabungan paksaan seperti ini terjadi di Uni Sovyet dan RRC serta negara-negara komunis lainnya.

- c. Melalui pengguntingan uang. Yaitu tabungan paksa dilakukan melalui pengguntingan uang, separoh untuk pemerintah dan separoh lagi untuk masyarakat. Cara seperti ini pernah terjadi di Indonesia dimasa orde lama.

Menurut Djojohadikusumo (1955: 79) cara pembangunan yang dilakukan melalui tabungan paksaan bukanlah merupakan cara yang sebaiknya diterima untuk pembangunan negara-negara Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa, kiranya masih ada jalan ke tiga yang dapat mencapai hasil yang sama, dengan tidak membawa begitu banyak pengorbanan dari pihak rakyat banyak yaitu dengan tabungan dan investasi negara melalui kebijaksanaan fiskal dan budgeter.

2. Pembentukan Modal Melalui Kebijakan Fiskal

Apabila tabungan sukarela masyarakat tidak dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan modal yang memadai, maka pemerintah negara-negara sedang berkembang mempunyai cukup alasan untuk mengerahkan tabungan melalui

berbagai macam kebijaksanaan fiskal.

Bentuk-bentuk kebijaksanaan fiskal yang dapat dilakukan dalam rangka pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang antara lain:

a. Pajak. Pajak merupakan salah satu alat utama dan paling efektif untuk mengurangi konsumsi swasta dan mengalihkan sumber-sumber kepada pemerintah demi terselenggaranya investasi produktif. Perpajakan mendorong pembentukan modal melalui dua cara:

- 1). Dengan mengalihkan sumber-sumber swasta kepada negara untuk dipergunakan dalam saluran yang diinginkan.
- 2). Dengan menyediakan rangsangan kepada sektor swasta untuk menaikkan produksi. Tujuan pajak ini adalah menyangkut jenis dan tingkat pajak yang harus dikenakan. Pajak langsung progressif pada pendapatan, kekayaan dan pengeluaran pribadi dan sebagainya harus diterapkan begitu rupa, sehingga pajak tidak mengurangi dorongan untuk bekerja, menabung dan menginvestasi. Pajak itu harus bertujuan untuk mengurangi kecendrungan golongan kaya pada konsumsi mewah, mengirim modal ke luar negeri, menimbun kekayaan dan spekulasi. Akan tetapi, keputusan mengenai tingkat pajak merupakan masalah yang paling rumit karena tidak dapat dikatakan dengan pasti pada tingkat berapa pajak itu akan mendorong atau justru menghambat usaha

swasta.

Pajak tidak langsung juga memberikan rangsangan bagi pembangunan dengan mengurangi konsumsi dan mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak lagi pula, pajak tidak langsung ini membantu mengumpulkan dana yang tak dapat dikumpulkan dengan cara lain dari masyarakat. Prosentase tinggi pada barang mewah dan prosentase rendah pada barang konsumsi merupakan prinsip pajak tidak langsung yang sudah diterima secara luas. Di samping itu pajak impor atas barang-barang mewah dapat membatasi konsumsi atas barang-barang ini dan dalam waktu yang sama memberikan pemasukan kepada negara untuk investasi produktif. Pajak atas pendapatan ekspor dan pengenaan pajak ekspor atas bahan mentah pertanian dan industri adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

- b. Pinjaman publik. Pinjaman publik juga merupakan alat penting untuk mengalihkan sumber-sumber dari bidang yang tidak produktif ke bidang yang produktif. Tetapi lingkup pinjaman ini di negara-negara sedang berkembang amat terbatas karena rendahnya pendapatan dan tabungan serta tingginya tingkat kecenderungan konsumsi. Di samping itu karena tidak adanya pasar modal dan pasar uang yang terorganisasi. Agar pinjaman publik ini berhasil, perlu dilakukan kampanye bersama melalui penerangan dan pendidikan sosial. Lebih jauh perlu didirikan suatu jaringan badan-badan

tingkat menengah dalam bentuk bank tabungan, bank komersial, perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga jaminan sosial dan lain sebagainya yang terorganisasi dengan baik.

3. Pembentukan Modal Melalui Kebijakan Budgeter

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk menaikkan tingkat pendapatan pemerintah, kebanyakan negara sedang berkembang masih menghadapi masalah dimana tabungan pemerintah masih kurang cukup apabila dibandingkan dengan keperluan dana untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, maka sebagai tambahan pemerintah harus melaksanakan kebijakan untuk memperoleh dana tersebut. Salah satu kebijakan itu adalah melalui kebijakan budgeter. Kebijakan budgeter ini adalah dalam rangka anggaran belanja negara. Bentuk kebijakan budgeter antara lain dengan melaksanakan anggaran belanja defisit, dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah.

Apabila sesuatu negara melaksanakan anggaran belanja negara secara defisit, maka defisit tersebut dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan berikut:

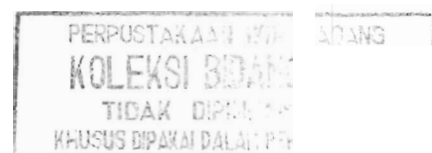
- a. Meminjam dari masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (bank tabungan, perusahaan asuransi, pasar modal dan sebagainya), bank-bank komersial dan bank sentral.
- b. Mencetak uang.

Memperbesar tersedianya dana untuk pembangunan dengan meminjam dari bank-bank komersial dan bank sentral serta dengan mencetak uang dapat menimbulkan masalah inflasi. Hal ini akan berbentuk tabungan paksa (forced saving). Selanjutnya memperbesar tersedianya dana untuk pembangunan dengan jalan meminjam dari masyarakat dan badan-badan keuangan di luar bank komersial tidak akan menimbulkan inflasi karena pinjaman tersebut diperoleh dari tabungan yang diciptakan masyarakat. Pinjaman itu merupakan suatu proses pemindahan daya beli dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dengan demikian pinjaman tersebut tidak akan menimbulkan daya beli baru di dalam masyarakat. Sedangkan pinjaman dari bank komersial dan bank sentral serta mencetak uang merupakan suatu penciptaan daya beli baru yang akan menaikkan keseluruhan permintaan masyarakat. Jika pertambahan permintaan yang ditimbulkan oleh penciptaan daya beli baru ini tidak dapat dipenuhi oleh kenaikan dalam penawaran barang-barang maka kenaikan harga akan terjadi.

Selanjutnya, cara yang umumnya dilakukan oleh pemerintah untuk meminjam dari masyarakat dan badan-badan keuangan adalah dengan menjual surat-surat berharga pemerintah yang berupa pinjaman jangka panjang seperti obligasi. Besarnya dana yang didapatkan dengan meminjam dari masyarakat ini, tergantung kepada sejauhmana pemerintah dapat menarik perhatian (minat) masyarakat untuk menanam modal dalam bentuk surat berharga pemerintah.

Cara paling mudah untuk membiayai defisit dalam anggaran belanja adalah dengan mencetak uang. Di negara-negara sedang berkembang, cara seperti ini sering menimbulkan inflasi. Hal ini disebabkan karena penambahan dalam pengeluaran masyarakat yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah yang berlebihan dapat menimbulkan kenaikan harga barang secara umum.

Dalam analisa ekonomi makro, melaksanakan anggaran belanja defisit merupakan kebijaksanaan yang perlu dijalankan apabila di dalam perekonomian dihadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan itu didasarkan kepada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran dalam berbagai jenis faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini menganggur karena ketiadaan pembeli dari barang-barang yang diproduksi. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak mencapai tingkat yang tinggi karena adanya kekurangan permintaan efektif dalam masyarakat. Oleh sebab itu perlulah pemerintah menciptakan pertambahan dalam permintaan masyarakat dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari penerimaannya. Pengeluaran yang bertambah tersebut akan menambah pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan yang bertambah ini akan memperbesar tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sebagai akibat dari proses multiplier, perluasan dari kegiatan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja yang pada akhirnya tercipta adalah jauh lebih besar dari yang pada mulanya diciptakan oleh defisit dalam anggaran belanja pemerintah.



lanja pemerintah.

Keadaan-keadaan di atas belum tentu akan terjadi di negara-negara sedang berkembang. Di negara-negara sedang berkembang, defisit dalam anggaran belanja pemerintah adalah lebih mudah menimbulkan masalah-masalah inflasi, karena para penganggur di negara-negara sedang berkembang terutama terdiri dari tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan pendidikan dengan demikian mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menambah produksi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Di kebanyakan negara sedang berkembang tingkat kegiatan ekonomi tidak dapat dirangsang perkembangannya dengan hanya menggunakan kebijaksanaan memperbesar permintaan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaannya. Di negara-negara sedang berkembang ini menambah permintaan masyarakat secara demikian tidak akan diikuti oleh kenaikan produksi yang berarti. Oleh sebab itu defisit dalam anggaran belanja pemerintah akan menimbulkan masalah kelbihan permintaan dan selanjutnya akan menimbulkan masalah inflasi.

Masalah inflasi di atas akan bertambah buruk, apabila kenaikan permintaan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan di sektor luar negeri. Negara-negara berkembang pada umumnya menghadapi masalah neraca pembayaran yaitu terdapat kecendrungan di mana pengeluaran untuk impor dan aliran masuk modal. Pertambahan permintaan yang diakibatkan oleh defisit dalam anggaran belanja pemerintah akan menaikkan permintaan atas barang-barang buatan dalam

negeri maupun luar negeri. Kenaikan permintaan ini menyebabkan impor naik, sedangkan pendapatan yang berasal dari ekspor tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut. Oleh sebab itu defisit dalam anggaran belanja pemerintah cenderung memperburuk masalah ketidak seimbangan dalam neraca pembayaran dan menaikkan harga valuta asing. Hal ini akan menimbulkan masalah inflasi yang bersumber dari kenaikan harga barang-barang impor.

4. Pengangguran Tak Kentara (Diguised Unemployment) Sebagai Sumber Pembentukan Modal.

Konsep pengangguran tak kentara diperkenalkan ke dalam teori keterbelakangan oleh Rosenstein-Rodan dalam artikelnya yang terkenal yaitu Problems of Industrialization of eastern and South-Eastern Europe, yang kemudian dirinci oleh R. Nurkse.

a. Arti Pengangguran Tak Kentara (Tersembunyi)

Dalam arti sempit, pengangguran tak kentara berarti bahwa dengan teknik dan sumber produktif tertentu, produktifitas marginal buruh di sektor pertanian negara sedang berkembang adalah nol. Dengan kata lain $MP_L = 0$

Contoh: 1 petak sawah dikerjakan oleh 2 orang, dengan bercocok tanam padi. Jumlah hasil (gabah) yang diperoleh adalah sebanyak 12 karung. Sekarang tenaga kerja yang diperkerja untuk luas sawah yang sama ditambah sebanyak 2 orang lagi, sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja adalah berjumlah 4 orang.

Hasil yang diperoleh dengan teknik dan sumber produktif yang juga sama dengan yang pertama, menghasilkan jumlah gabah sebanyak 12 karung (hasil yang diperoleh adalah tetap). Dengan demikian tambahan hasil yang diperoleh dengan menambah tenaga kerja adalah sama dengan nol.

Tenaga kerja yang marginal produknya sama dengan nol inilah yang merupakan sumber potensial dalam pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang. Sumber potensial (tabungan potensial) dapat dirobah menjadi tabungan riil dengan jalan mengalihkan kelebihan tenaga kerja tadi dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian seperti industri, jasa dan perdagangan, tanpa mengurangi output total pertanian. Pengangguran seperti ini ditemui pada bidang pertanian yang terlalu banyak buruh bekerja sebagai akibat langkanya kesempatan kerja lain yang bersifat pengganti atau pelengkap.

Pengangguran tak kentara sebagai potensi tabungan seperti tersebut di atas di kemukakan oleh Ragnar Nurkse. Menurut Nurkse, keadaan pengangguran tersembunyi di negara terbelakang merupakan potensi tabungan yang tersembunyi.

Pada azasnya para penganggur tak kentara adalah golongan tenaga kerja yang tidak produktif yang bisa hidup karena diberi makan oleh golongan tenaga kerja yang produktif di lapangan agraria. Dengan perkataan lain, golongan yang produktif sebenarnya mengadakan tabungan, akan tetapi jumlah tabungan serupa ini dihabiskan untuk

konsumsi golongan tenaga kerja yang tidak produktif atau disguised unemployed. Keadaan ini akan menjadi berlainan jika golongan tenaga kerja yang tidak produktif ini bekerja di lapangan-lapangan baru, dan akan tetap diberi makan oleh para petani yang tinggal di lapangan produksi bahan makanan, maka tabungan yang tersembunyi akan bisa menjadi tabungan efektif (riil).

b. Keterbatasan Dari Pengangguran Tak Kentara Sebagai Potensi Tabungan adalah sebagai berikut:

- 1). Kecendrungan Berkonsumsi (MPC) Buruh Tidaklah Konstan. Menurut Nurkse, kecendrungan berkonsumsi pada buruh yang baru diperkerjakan dan buruh yang tetap tinggal di desa adalah konstan. Kurihara dalam Jhingan (1975) yang diterjemahkan Guritno (1986: 444) berpendapat sebagai akibat pemindahan pengangguran tak kentara ke sektor barang modal, kecendrungan berkonsumsi di dalam keseluruhan perekonomian boleh jadi meningkat. Hal demikian akan mendorong penekanan alokasi sumber-sumber tersebut seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan output barang-barang modal.
- 2). Masalah Pengumpulan Dan Pembagian Surplus Makanan. Nurkse tidak mampu memperagakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembahagian surplus makan dari mereka yang bekerja di sektor pertanian kepada mereka yang bekerja di lapangan-lapangan baru.

- 3). Surplus Barang Yang Dapat Dipasarkan Tidak Meningkatkan. Selanjutnya, cukup meragukan apakah pemindahan surplus tenaga kerja dari sektor pertanian akan meningkatkan surplus barang yang dapat dipasarkan.
- 4). Sulit Mengerahkan Penganggur Tak Kentara. Tidak begitu mudah menggerakkan para penganggur tak kentara dan mengirimkannya ke proyek-proyek modal baru, karena mereka terikat kuat kepada keluarga dan tanah sehingga tidak mau meninggalkan sanak saudaranya dan berpindah ke proyek-proyek baru.
- 5). Mustahil Mendapatkan Pekerjaan Tanpa Pembayaran Upah. Dalam analisa Nurkse, masalah pembayaran upah kepada pekerja investasi tidak muncul karena keseluruhan proses pembentukan modal diasumsikan untuk membiayai diri sendiri (self financing). Asumsi ini tidak realistis, sebagai dikatakan oleh Lewis, buruh tidak diupah mungkin sangat penting di negara yang menganut kerja paksa, tapi di negara lain jumlahnya sangat terbatas.
- 6). Masalah Inflasi dan Neraca Pembayaran. Tugas menyediakan pekerjaan bagi surplus tenaga kerja mengandung sejumlah kesulitan. Lewis berpendapat bahwa apa yang menghalangi penggunaan buruh semacam itu bukan karena langkanya modal tetap, tetapi langkanya modal kerja.
- 7). Buruh Tak Terdidik Tidak Mungkin Menaikan Output Modal. Menurut Kurihara, penggunaan buruh tak terdidik dan kurang peralatan tidak mungkin menaikan se-

cara cukup output modal tetap yang sangat mutlak bagi industrialisasi.

8). Dampak Pertambahan Penduduk Pada Pembentukan Modal.

Nurkse lupa menelaah dampak pertambahan penduduk pada pembentukan modal. Pertumbuhan penduduk yang cepat kian mempersulit usaha meningkatkan laju pembentukan modal dalam dua cara yaitu:

- a). Pertambahan angkatan kerja tidak produktif terjadi secara terus menerus sehingga menelan habis apa pun yang diciptakan oleh potensi tabungan melalui pemindahan pengangguran tak kentara ke proyek-proyek modal baru.
- b). Pertumbuhan penduduk yang melampaui pembentukan modal, dengan demikian menunjukkan bahwa penganggur tak kentara tumbuh lebih cepat dari pada yang dapat diserap secara produktif oleh persediaan modal yang diharapkan dapat dikembangkan oleh pengangguran tak kentara itu sendiri.

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan pengangguran tak kentara sebagai potensi tabungan yang tersembunyi dan karena itu sebagai sumber pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang, menghadapi berbagai macam kesulitan.

5. Pembentukan Modal Manusia Sumber Pembentukan Modal

Pembentukan modal manusia merupakan proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian

an, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif.

Gagasan investasi pada modal manusia adalah betul-betul baru. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting pembentukan modal fisik. Sekarang makin disadari bahwa pertumbuhan perseediaan modal nyata sampai pada batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu proses pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara (Harbison, *et al.*, 1964: 85).

Kebutuhan investasi pada pembentukan modal manusia di dalam perekonomian, semakin jelas dari fakta bahwa walaupun dengan impor modal fisik secara besar-besaran ternyata tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan, lantaran sumber manusianya terbelakang. Modal manusia diperlukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pemerintahan yg semakin penting, untuk memperkenalkan sistim baru, membangun peralatan baru, melaksanakan industrialisasi dan untuk membangun sistim pendidikan dan lain-lainnya.

6. Inflasi Sebagai Sumber Pembentukan Modal

Meskipun inflasi merupakan suatu sumber pembentukan modal yang banyak merugikan masyarakat, namun dia adalah sumber tabungan yang potensial. Inflasi dianggap

sebagai pajak tersembunyi atau tidak kelihatan. Ketika harga naik, kenaikan ini akan mengurangi konsumsi dan dengan demikian mengalihkan sumber-sumber dari konsumsi uang ke investasi. Pemerintah menciptakan inflasi dengan jalan menerbitkan uang kerta lebih banyak ke peredaran, untuk memenuhi keperluannya.

Inflasi memang meningkatkan tabungan tetapi dengan mengorbankan standar kehidupan masyarakat. Rasa tidak puas kemudian timbul di antara masyarakat, serikat buruh berjuang untuk kenaikan upah dan produktifitas terkena getahnya. Menaikan harga dan biaya juga berarti mengurangi ekspor ke pasar dunia. Jadi inflasi sebagai suatu metode pembentukan modal, membawa lebih banyak kerugian dari pada keuntungan kecuali jika pemerintah mengambil langkah-langkah penangkal.

7. Keuntungan Badan Usaha Negara Sebagai Sumber Pembentukan Modal.

Pemerintah dapat juga memobilisasi tabungan domestik bagi pembentukan modal dengan mendirikan badan usaha publik. Badan ini menerima dana dari pasar bebas dalam bentuk modal bersih (equity capital) dan utang obligasi (bonded debt) dan di negara seperti India, menerima langsung dari pemerintah.

Badan usaha milik negara ini merupakan pengganti perusahaan di negara sedang berkembang. Mereka pada umumnya mempergunakan sumber sendiri sebagai modal kerja. Tetapi di negara sedang berkembang tertentu di mana badan-badan usaha publik didirikan sebagai perusaha

na badan-badan usaha publik didirikan sebagai perusahaan negara keuntungannya dipergunakan untuk pembentukan modal. Selanjutnya pendirian berbagai macam badan usaha publik ini, membantu mengorganisasi pasar uang dan pasar modal dalam mengerahkan tabungan domestik bagi pembentukan modal.

B. Sumber Pembentukan Modal Dari Luar Negeri

Apabila sumber pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pembangunan maka perlu diusahakan sumber-sumber pembentukan modal dari luar negeri. Ada beberapa sumber pembentukan modal dari Luar Negeri sebagai berikut:

1. Bantuan Luar Negeri

Aliran modal dari luar negeri dinamakan bantuan luar negeri. Ciri-ciri dari bantuan luar negeri adalah;

- a. Ia merupakan aliran modal yang bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan.
- b. Dana tersebut diberikan kepada negara atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku di pasar internasional.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri adalah pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman

an, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan sebagainya.

Selanjutnya pemberian merupakan suatu bantuan penuh dari negara donor kepada negara penerima, negara penerima tidak diwajibkan untuk membayar kembali atau melakukan balas jasa lain sebagai imbalan kepada pemberian tersebut. Sedangkan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah dan badan-badan internasional bukanlah bantuan penuh karena negara penerima mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga atas pinjaman tersebut.

Besarnya unsur bantuan yang terkandung dalam pinjaman luar negeri tergantung kepada syarat-syarat pembayaran kembali dari bantuan tersebut yaitu tergantung kepada:

- a. Tenggang waktu (grace period) yaitu jangka waktu dalam mana cicilan pembayaran kembali pinjaman tidak perlu dilakukan.
- b. Jangka masa pembayaran kembali (maturity atau amortization period).
- c. Tingkat bunga dari bantuan yang diberikan.

Unsur bantuan yang terkandung dalam sesuatu pinjaman luar negeri bertambah tinggi dan ia dinamakan dengan pinjaman bersyarat ringan (soft loan). Pinjaman bersyarat ringan apabila tenggang waktu pembayaran kembali dari pinjaman itu bertambah panjang dan tingkat bunganya bertambah rendah. Sedangkan pinjaman itu dikatakan ber-

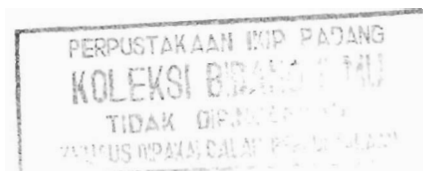
syarat berat (hard loan) apabila tenggang waktu dan jangka masa pembayaran kembali adalah relatif singkat, tingkat bunganya relatif tinggi.

Bentuk dari syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada sesuatu negara berkembang tergantung kepada faktor ekonomi dan politik seperti; tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari negara-negara penerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan dan motif-motif dari negara donor dalam memberikan bantuan. Oleh karenanya sesuatu negara donor pada umumnya memberikan syarat-syarat bantuan yang berbeda-beda kepada setiap negara yang menerima bantuannya syarat-syarat bantuan dari berbagai negara kepada sesuatu negara juga tidak sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin miskin suatu negara semakin rumit masalah pembangunan yang dihadapinya, semakin ringan syarat-syarat bantuan yang diberikan kepadanya.

Ada dua peranan utama dari bantuan luar negeri sebagai berikut:

- a. Mengatasi masalah kekurangan tabungan.
- b. Mengatasi masalah kekurangan mata uang asing.

Kedua masalah kekurangan dana ini dinamakan masalah jurang ganda (The two gaps problem) yaitu jurang tabungan (saving gap) yang berarti bahwa tabungan yang dapat diciptakan di dalam negeri adalah tidak cukup untuk membiayai penanaman modal yang dapat dilaksanakan. Jurang



mata uang asing (foreign exchange gap) yang berarti bahwa mata uang asing yang tersedia adalah tidak cukup untuk membiayai impor yang diperlukan.

Dalam melaksanakan program pembangunannya, biasanya negara-negara sedang berkembang menentukan tingkat pertumbuhan yang diharapkannya dan tingkat penanaman modal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Apabila tabungan yang dapat diciptakan di dalam negeri melebihi penanaman modal yang akan dilaksanakan, maka pembangunan yang direncanakan dapat dicapai tanpa bantuan luar negeri. Akan tetapi, pada umumnya negara-negara sedang berkembang tidak dapat menciptakan tabungan sebanyak yang diperlukan dan oleh karenanya modal luar negeri perlu dikerahkan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kekurangan tabungan bukanlah satu-satunya masalah kekurangan dana yang dapat menghambat tercapainya tujuan mempercepat lajunya pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang direncanakan hanya akan tercapai apabila diikuti oleh pertambahan kemampuan untuk membiayai pertambahan impor yang akan dilakukan. Pembangunan ekonomi akan menaikkan impor karena:

- a. Kenaikan pendapatan yang ditimbulkan oleh pembangunan akan menambah barang-barang konsumsi.
- b. Penanaman modal yang dilakukan merupakan faktor utama yang menimbulkan pembangunan tersebut akan memerlukan alat-alat modal dan bahan-bahan mentah yang berasal dari luar negeri. Apabila impor yang akan menjadi bertambah tinggi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh ke-

naikan pendapatan dari ekspor, impor harus dikurangi dan ini akan mengurangi tingkat penanaman modal yang akan dilakukan.

Sejak tahun 1950-an jumlah bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang terus menerus mengalami kenaikan. Diantara tahun 1950 s/d 1955 bantuan pemerintah negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kepada negara-negara berkembang hanya berjumlah US\$ 1,9 milyar, meningkat menjadi US\$ 3,3 milyar pada tahun 1956 dan US\$ 4,3 milyar pada tahun 1959 (Bhagwati, 1970:12). Jumlah bantuan tersebut pada tahun 1960, 1965 dan tahun tahun antara 1970-75 ditunjukkan dalam tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa menurut harga yang berlaku nilai bantuan meningkat menjadi dua kali lipat di antara tahun 1960 dan 1973, yaitu dari US\$ 4.665 juta menjadi US\$ 9.415 juta. Tetapi kalau dinilai menurut harga tahun 1973, kenaikannya hanyalah dari US\$ 7.660 pada tahun 1960 menjadi US\$ 9.415 juta pada tahun 1973, yaitu sebesar 21.2%. Hal ini berarti bahwa ditinjau dari daya belinya pertambahan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan yg berarti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
 Bantuan Luar Negeri Netto Dari Negara-
 Negara Maju Kepada Negara Berkembang
 (Dalam Jutaan Dolar A.S)

| | 1960 | 1965 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 1. Menurut harga yang berlaku | 4.665 | 5.895 | 6.832 | 7.762 | 8.671 | 9.415 | 10.706 | 11.948 |
| 2. Menurut harga tahun 1973 | 7.660 | 9.069 | 9.346 | 9.976 | 10.059 | 9.415 | 9.391 | 9.452 |
| 3. Bantuan sebagai % GNP negara-negara yang memberi bantuan | 0,52 | 0,44 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |

Sumber: Robert S. McNamara, *Address to the Board of Governors of the World Bank Group*, Washington D.C., World Bank, 1974, dalam Sukirno (1985: 375).

Dari tabel 1 di atas, jelas terlihat bahwa jumlah bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara sedang berkembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun suatu masalah yang sekarang menimbulkan kegelisahan kepada negara-negara berkembang adalah masalah pembayaran kembali utang-utang yang telah diperoleh pada masa lalu.

2. P i n j a m a n

Sebagaimana halnya dengan bantuan luar negeri, maka pinjaman yang berasal dari pihak swasta di luar negeri juga mempunyai peranan yang sama yaitu untuk mengisi kekurangan modal. Akan tetapi pinjaman tidak bisa digolongkan sebagai bantuan luar negeri. Ini disebabkan oleh syarat-syarat pinjaman swasta di negara-negara sedang berkembang sama dengan yang berlaku di pasaran internasional.

Pada dasarnya dapatlah dikatakan bahwa pihak swas-

ta di negara-negara maju meminjamkan uangnya bukan atas dasar keinginan untuk memberi bantuan tetapi untuk memperoleh keuntungan dari padanya. Oleh sebab itu aliran modal (pinjaman) tersebut, walaupun membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah kekurangan tabungan dan mata uang asing, berarti memegang peranan yang sama seperti bantuan luar negeri, tidak dapat dipandang sebagai bantuan luar negeri.

3. Penanaman Modal Asing Swasta

Penanaman modal asing swasta mempunyai syarat-syarat dan tujuan yang sama dengan pinjaman swasta. Bedanya hanya terletak pada balas jasa yang akan diperoleh oleh negara yang meminjamkan. Kalau berupa pinjaman maka yang meminjamkan akan memperoleh bunga yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku di pasaran internasional. Dan apabila modal tersebut berupa penanaman modal maka keuntungan yang akan diperoleh adalah bebas untuk dikirim kembali ke negara asal modal tersebut. Seperti halnya dengan pinjaman, penanaman modal swasta tidak dapat dipandang sebagai bantuan luar negeri.

Berdasarkan kepada sifatnya, modal asing swasta yang mengalir dari negara-negara maju ke negara-negara maju ke negara-negara berkembang dapat dibedakan dalam tiga jenis sebagai berikut:

a. Penanaman modal langsung (direct foreign investment)

Dewasa ini telah makin disadari oleh negara-negara sedang berkembang bahwa penanaman modal langsung

dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam pembangunan ekonomi, karena penanaman modal langsung ini mempunyai kelebihan-kelebihan berikut:

- 1). Penanaman modal asing langsung, memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang modern ke negara sedang berkembang.
- 2). Pada gilirannya, ia akan mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerja sama dengan perusahaan asing. Pada kenyataannya, perusahaan asing mendorong perusahaan lokal dengan dua cara:
 - a). Secara langsung membantu perkembangan perusahaan lokal dengan tenaga manusia, uang dan bahan serta memberikan latihan dan pengalaman kepada para personil.
 - b). Secara tidak langsung menciptakan permintaan bagi jasa-jasa tambahan yang bagi perusahaan asing swasta tidak ekonomis ditangani sendiri.
- 3). Penanaman modal langsung mempunyai keuntungan tambahan melebihi penanaman modal portfolio dalam hal negara sedang berkembang memperoleh jumlah modal yang lebih besar. Sebahagian laba dari penanaman langsung pada umumnya ditanamkan kembali ke dalam pengembangan, modernisasi atau pembangunan industri yang terkait.
- 4). Penanaman modal asing swasta disalurkan kepada penggunaan yang logis dan produktif, karenanya ia menambah kapasitas produksi negara peminjam modal.

- 5). Dalam hal penanaman modal langsung, kemungkinan pelarian modal dari negara peminjam kurang dan karena itu juga dimungkinkan beban neraca pembayaran menjadi kecil selama depresi karena penanaman modal langsung, tidak seperti obligasi, dibayar dengan deviden yang dikaitkan dengan laba.
- 6). Pada tahap awal pembangunan, penanaman modal asing langsung juga meringankan beban neraca pembayaran negara sedang berkembang. Karena, tenggang waktu antara pengoperasian perusahaan bisnis baru dan perolehan laba adalah lama. Selain itu pada tahap awal produksi, laba mungkin kecil. Jadi perolehan laba dari penanaman modal langsung kurang membawa tekanan pada neraca pembayaran bila dibandingkan dengan penanaman modal portfolio.
- 7). Karena penanaman modal asing langsung mengalir ke sektor pertanian dan industri penglohan yang memproduksi barang-barang primer untuk ekspor, selanjutnya membantu meringankan posisi neraca pembayaran negara sedang berkembang.
- 8). Penanaman modal langsung yang mengalir ke negara sedang berkembang mendorong pengusahanya untuk menanam modal di negara sedang berkembang lain.

Dengan berbagai kelebihan yang diciptakan oleh penanaman modal langsung seperti yang baru dijelaskan ini tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya menjamin bahwa pembangunan ekonomi yang lebih cepat akan tercipta. Penanaman modal asing dapat juga menimbulkan beberapa akibat yang tidak menguntungkan kepada pembangunan ekonomi sebagai

impor atas alat-alat modal dan peralatan yang digunakan. Dengan demikian, dalam masa-masa permulaan dari kebijaksanaan menarik modal asing, pembangunan di beberapa kegiatan ekonomi lainnya harus dikorbankan dan pemerintah tidak memperoleh pendapatan yang berarti dari modal asing yang masuk.

b. Penanaman Modal Portfolio (Portfolio Investment)

Penanaman modal portfolio merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (bond) dan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara berkembang.

Ciri-ciri penanaman modal portfolio adalah sebagai berikut :

- (1). Penanaman modal portfolio hanya terbatas kepada menyediakan modal yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan industri dan kegiatan modern lainnya.
- (2). Penanaman modal ini tidak menyediakan sumberdaya lain seperti pengetahuan teknik, tenaga usahawan, teknologi modern dan sebagainya.
- (3). Penanaman modal potfolio hanyalah berupa penyer_utaan dalam pemilikan perusahaan dan bukan penguasaan kegiatan perusahaan sehari-hari.

Penanaman modal portfolio lebih menguntungkan dari pada penanaman modal langsung karena penanaman modal portfolio tidak memerlukan biaya yang lebih

berikut:

- a). Penanaman modal langsung dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang apabila kegiatan mereka mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat dari lebih banyaknya barang-barang konsumsi yang tersedia, tidak menanam kembali keuntungan yang diperoleh dan menghalangi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis.
- b). Perusahaan-perusahaan asing dapat menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis dengan mereka. Pengetahuan teknologi, keahlian management dan keahlian pemasaran yang lebih baik dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing akan melemahkan persaingan dari perusahaan nasional dan menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan nasional.
- c). Pada masa-masa permulaan dari usaha mengundang penanaman modal asing pemerintah harus menciptakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh modal asing terutama perbaikan prasarana-prasarana yang diperlukan oleh mereka. Untuk keperluan ini harus digunakan dana pembangunan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sektor atau kegiatan lain. Tambahan pula untuk menarik modal asing, pemerintah biasanya harus menawarkan beberapa keringanan fiskal, seperti tidak perlu membayar pajak untuk beberapa tahun dan membebaskan pembayaran bea

besar. Pengusaha lokal akan memiliki kemungkinan lebih banyak untuk mengawasi penggunaannya disamping rasa tanggungjawab yang lebih besar untuk meletakkan dana pada saluran yang mendatangkan hasil. Walaupun demikian sampai akhir-akhir ini peranan penanaman modal portfolio dalam melancarkan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah lebih terbatas dari pada penanaman modal langsung yang mengalir ke negara-negara sedang berkembang (Sukirno, 1985: 382).

Berdasarkan kepada kesanggupan negara sedang berkembang untuk menyerap modal dapatlah dikatakan bahwa penanaman modal portfolio adalah jauh lebih sedikit dari pada jumlah kekurangan modal yang dihadapi negara sedang berkembang. Kurangnya penanaman modal portfolio di negara sedang berkembang disebabkan oleh :

- (1). Terdapatnya keraguan dikalangan para penanaman modal mengenai kemampuan perusahaan-perusahaan di negara sedang berkembang untuk membayar kembali hutang-hutang mereka dan membayar deviden saham-saham yang mereka keluarkan.
- (2). Ketidak stabilan politik dan ekonomi di negara-negara sedang berkembang menyebabkan menanam modal ke negara-negara itu sangat tinggi resikonya.
- (3). Dibanyak negara sedang berkembang pasar modal masih belum sepenuhnya berkembang.
- (4). Kekurangan usaha untuk memberikan penerangan mengenai pembangunan ekonomi yang berlaku di negara maju menyebabkan banyak diantara penanam modal di negara

maju tidak mengetahui tentang kesempatan-kesempatan menanam modal yang menguntungkan di negara-negara sedang berkembang.

c. Pinjaman Ekspor (Export Credit)

Jenis penanaman modal swasta yang ke tiga adalah pinjaman ekspor. Pinjaman ekspor adalah pinjaman jangka pendek yang memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha atau badan-badan pemerintah di negara-negara sedang berkembang untuk membeli alat-alat modal dan peralatan dalam bentuk kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

Pinjaman ekspor dapat memberikan sumbangan yang cukup penting kepada sesuatu negara, asal saja pengeluaran modal ini dilaksanakan setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu karena jangka pembayaran kembalinya relatif singkat, pinjaman ekspor lebih mudah menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran kalau dibandingkan dengan jenis modal asing lainnya yang mengalir ke negara-negara sedang berkembang.



BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMBENTUKAN MODAL
DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

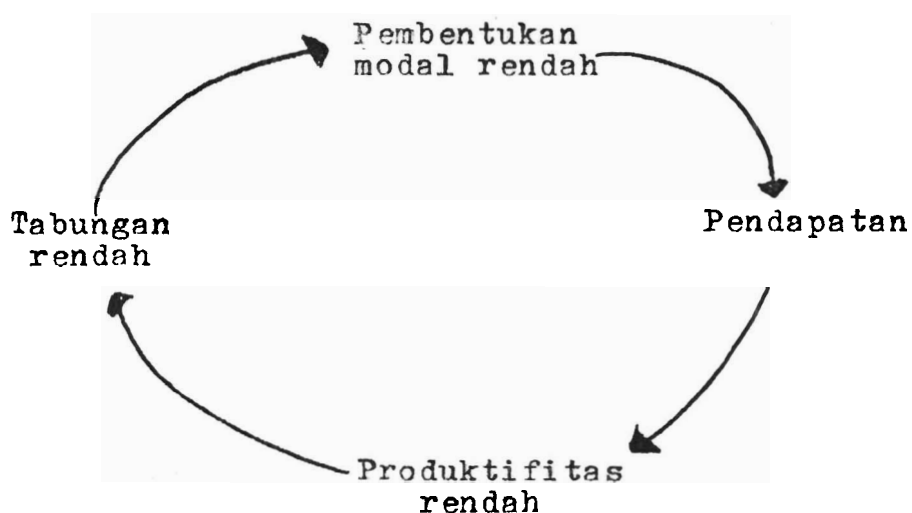
Di negara sedang berkembang tingkat pembentukan modal umumnya rendah. Alasannya karena negara-negara tersebut kekurangan faktor-faktor yang menentukan pembentukan modalnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pembentukan modal di negara sedang berkembang sebagai berikut:

A. Terdapatnya Lingkaran Perangkap Kemiskinan (The Vicious Circles).

Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse (1953: 5), seorang ahli ekonomi yang mempelopori penelaahan atas masalah pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang.

Menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu:

1. Dari segi penawaran akan modal (Supply of Capital)
Dari segi penawaran akan modal, lingkaran perangkap kemiskinan adalah sebagai berikut: Tingkat pendapatan yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktifitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Hal ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Pembentukan modal yang rendah akan dapat menyebabkan sesuatu negara menghadapi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktifitas akan tetap rendah. Secara visual lingkaran perangkap kemiskinan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Lingkaran Perangkap Kemiskinan Ditinjau Dari Segi Penawaran Modal

2. Dari Segi Permintaan Akan Modal (Demand For Capital)
Dari segi permintaan akan modal, lingkaran perangkap kemiskinan adalah: Pembentukan modal yang rendah disebabkan oleh produktifitas rendah menyebabkan pen-

dapatan rendah. Pendapatan rendah mengakibatkan tenaga beli masyarakat rendah menyebabkan pembentuk modal rendah, dan sebaliknya. Secara visual lingkaran perangkat kemiskinan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



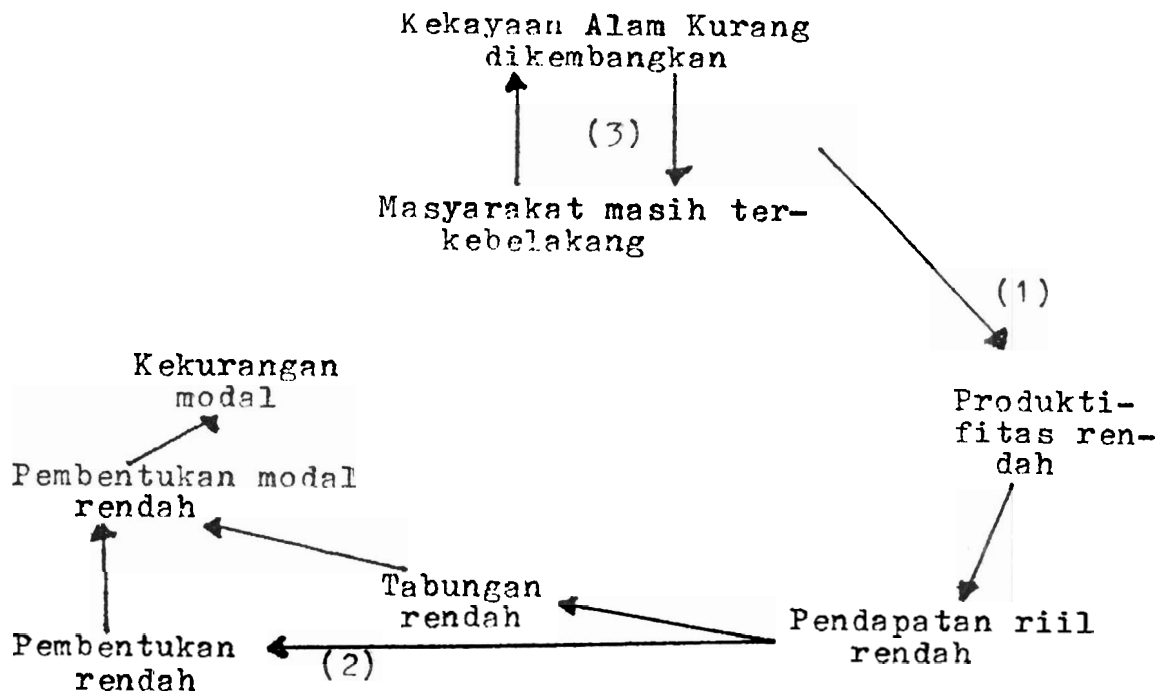
Gambar 2. Lingkaran Perangkat Kemiskinan Ditinjau Dari Segi Permintaan Modal

Dari lingkaran-lingkaran perangkat kemiskinan tersebut di atas jelaslah bahwa tabungan yang besar penting bagi pembentukan modal dan tabungan tergantung pada besarnya pendapatan. Karena sektor pertanian, industri dan sektor lainnya di negara sedang berkembang masih belum berkembang maka output nasional menjadi rendah dan begitu juga dengan pendapatan nasional. Pada sisi lain kecendrungan berkonsumsi sangat tinggi yang kebanyakan ekonom mengemukakan bahwa MPC negara sedang berkembang adalah mendekati satu ($MPC \leq 1$). Dengan demikian ham-

pir keseluruhan pendapatan dihabiskan untuk konsumsi. Jadi menabung menjadi tidak mungkin dan tingkat pembentukan modal tetap rendah.

Selanjutnya, karena tingkat produktifitas sangat rendah maka laju pertumbuhan pendapatan nasional, tabungan dan pembentukan modal juga sangat rendah. Oleh sebab itu sumber alam sering dipergunakan secara keliru atau malah tidak diolah karena langkanya buruh yang efisien dan kurangnya pengetahuan teknologis, tidak tersedianya modal dan sebagainya. Faktor ini menghalangi kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan pemilik sumber alam hingga tidak mampu untuk menabung dan berinvestasi dan akibatnya laju pembentukan modalpun tidak meningkat. Dalam hubungan dengan kurang dikembangkannya sumberdaya alam di negara sedang berkembang maka Meier dan Baldwin (1960: 320) mengemukakan pula satu lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi di antara keadaan masyarakat yang masih terkebelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Di negara-negara berkembang kekayaan alam belumlah sepenuhnya diusahakan karena tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah karena kurangnya tenaga-tenaga ahli yang diperlukan dan terbatasnya mobilitas dari sumber-sumber daya.

Ketiga lingkaran perangkap kemiskinan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Lingkaran Perangkap Kemiskinan Ditinjau Dari Sudut; Permintaan Akan Modal, Penawaran Akan Modal Dan Hubungan Yang Saling Mempengaruhi Antara Keadaan Masyarakat Dengan Kekayaan Alam
Sumber: Meir and Baldwin (1960: 320)

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa, kekayaan alam yang kurang dikembangkan diakibatkan oleh masyarakat masih terkebelakang, keadaan ini menyebabkan produktifitas menjadi rendah yang mengakibatkan pendapatan riil rendah. Pendapatan riil rendah akan mengakibatkan dua hal yaitu; tingkat tabungan rendah dan konsumsi masyarakat juga rendah. Keduanya ini melalui suatu proses multiplier akan menyebabkan pembentukan modal rendah. Pembentukan modal rendah mengakibatkan suatu negara akan kekurangan modal. Selanjutnya masyarakat masih terkebelakang juga akan menyebabkan suatu negara kurang mengembangkan kekayaannya sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan rendah-

nya pembentukan modal.

B. Kekurangan Wiraswasta (entrepreneur)

Kurangnya tenaga wiraswasta merupakan salah satu faktor penghambat pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang. Wiraswasta adalah orang yang melakukan inovasi-inovasi dan berani menanggung resiko sehubungan dengan inovasi-inovasi tersebut. Inovasi merupakan penerapan pengetahuan teknologi di dunia ekonomi/komersial/kemasyarakatan atau dengan kata lain inovasi adalah mewujudkan suatu ide menjadi suatu kenyataan.

Ada lima macam kegiatan yang oleh Schumpeter dimasukkan sebagai inovasi yaitu:

1. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.
2. Diperkenalkannya cara berproduksi baru.
3. Pembukaan daerah-daerah pasar baru.
4. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru
5. Perubahan organisasi industri sehingga : meningkatkan efisiensi industri.

Kelima-lima inovasi tersebut akan menyebabkan pembangunan ekonomi atau development. Pembangunan ekonomi merupakan kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan para wiraswasta. Sehubungan dengan itu, Schumpeter sering menyamakan inovasi ini dengan pembangunan ekonomi (Roepke, 1978 dalam Manan, 1987: 115). Selanjutnya, kenapa wiraswasta (entrepreneur) merupakan faktor penting dalam pembentukan modal ?. Seberapa ada-

lah karena dengan memakai secara baru sumber-sumber yang ada (menghasilkan produk-produk baru) dan dengan mengkombinasikannya secara baru untuk menghasilkan produk baru dan lama, terciptalah tambahan pendapatan atau peningkatan produktifitas dan jika pendapatan yang diciptakan oleh kegiatan kewiraswastaan bertambah lebih cepat dari faktor-faktor terutama tenaga kerja maka pendapatan rata-rata tenaga kerja meningkat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan. Apabila tingkat konsumsi dan jumlah tabungan masyarakat meningkat maka melalui suatu proses multiplier akan menyebabkan terjadinya pembentukan modal dalam suatu negara. Dalam teori Harrod-Domard, pembentukan modal itu dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang dan jasa maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dengan demikian tenaga wira-swasta (entrepreneur) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Di negara sedang berkembang, tenaga wira-swasta ini kurang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya modal sehingga untuk melaksanakan inovasi-inovasi menjadi terhambat.
2. Terbatasnya pasar dalam negeri negeri dan luar negeri. Terbatasnya pasar dalam negeri antara lain disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat rendah menyebabkan

daya beli rendah. Sedangkan terbatasnya pasaran luar negeri antara lain disebabkan oleh kualitas dan harga barang yang tidak bisa bersaing dipasaran internasional.

3. Kurang menunjangnya lingkungan sosial, politik serta teknologi untuk melaksanakan inovasi.
4. Langkanya milik pribadi dan perjanjian, dan sebagainya memperlambat usaha dan inisiatif, dengan demikian laju pembentukan modal menjadi rendah.

C. Masalah Kependudukan.

Negara sedang berkembang memiliki permasalahan penduduk yang membuat laju pembentukan modal tetap rendah. Laju pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan tinggi. Dalam tahun 1985 penduduk dunia berjumlah kurang lebih 4,8 milyar dimana tiga perempat dari jumlah tersebut hidup di negara-negara sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga, dan kurang dari seperempatnya hidup di negara maju (developed countries). Di antara kedua kelompok negara tersebut terdapat perbedaan tingkat kelahiran dan kematian yang menjolok. Tingkat kelahiran pada negara-negara berkembang umumnya sangat tinggi yaitu berkisar antara 35-40 setiap 1.000 penduduk sedangkan di negara-negara maju kurang dari setengahnya.

Tingkat kematian di dunia ketiga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju, tetapi karena adanya usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan kesehatan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular, perbedaan

tingkat kematian antara negara berkembang dan negara ma-
ju lebih kecil dari pada perbedaan tingkat kelahiran.
Akibatnya rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun di
negara-negara dunia ketiga ini mencapai 2,1%, dibanding-
kan dengan hanya 0,6% di negara-negara industri atau De-
veloped Countries (Todaro, 1985 terjemahan Abdullah,
1987: 40).

Dampak dari tingginya angka kelahiran di negara-ne-
gara berkembang adalah bahwa hampir setengah dari pen-
duduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang da-
ri 15 tahun, dibandingkan dengan hanya sekitar seperem-
pat dari penduduk di negara-negara maju. Jadi angkatan
kerja di negara-negara berkembang harus memelihara anak
yang secara proposional jumlahnya hampir dua kali di-
bandingkan dengan negara-negara kaya. Di sisi lain pro-
porasi penduduk yang berumur di atas 65 tahun jauh lebih
besar di negara-negara maju. Penduduk yang berusia lan-
jut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut
dengan beban ketergantungan (dependency ratio) dalam arti
kata bahwa mereka merupakan anggota masyarakat yang
tidak produktif, sehingga menjadi beban tanggungan ang-
katan kerja (biasanya yang berumur sekitar 15 tahun dan
64 tahun). Secara keseluruhan beban ketergantungan itu
baik tua maupun muda mencapai $1/3$ dari penduduk maju di-
bandingkan dengan $1/2$ penduduk negara sedang berkembang.
Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa di negara-negara
berkembang lebih dari 90% beban ketergantungan terdiri
dari anak-anak sedangkan di negara maju hanya 66%.

Dengan demikian negara-negara sedang berkembang tidak hanya menghadapi permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun juga menanggung beban ketergantungan yang tinggi. Di pihak lain, pendapatan per kapita rendah. Sebagai akibatnya keseluruhan atau sebahagian besar pendapatan dipergunakan untuk menghidupi tambahan penduduk dan hanya sebahagian kecil saja yang ditabungkan untuk pembentukan modal. Di samping itu pertambahan jumlah penduduk memperberat kelangkaan modal karena diperlukan investasi besar untuk membekali tenaga buruh yang membengkak tersebut meski hanya dengan alat perlengkapan yang sudah usang. Lagi pula, jumlah anak yang terlampaui banyak dalam keseluruhan penduduk merupakan beban berat bagi orang tua untuk membesarkannya karena itu mustahil untuk menabung bagi pembentukan modal. Harapan hidup lebih pendek, yang berarti hanya sebagian kecil saja penduduk yang dapat menjadi tenaga buruh efektif. Karena banyak buruh meninggal pada puncak kemampuan yang tertinggal adalah sejumlah kecil orang dewasa, yang terpaksa menghidupi sejumlah besar anak-anak. Ini membuat pendapatan per kapita turun lebih drastis. Masalah kependudukan akhirnya menghambat laju pembentukan modal.

D. Kekurangan Overhead Ekonomi.

Kehadiran overhead ekonomi adalah penting untuk menciptakan iklim usaha dan membuat investasi berbuah karena dalam batas tertentu pembentukan modal tergantung padanya. Akan tetapi overhead ekonomi seperti sumber te

naga, angkutan, perhubungan, air dan sebagainya jarang tersedia di negara-negara sedang berkembang. Kekurangan ini memperlambat usaha, kegiatan investasi dan tentu saja laju pembentukan modal.

E. Tidak Meratanya Distribusi Pendapatan

Pada tahun-tahun 1960-an dan awal 1970-an menunjukkan, baik secara implisit maupun secara eksplisit bahwa para ahli ekonomi dari negara-negara maju dan berkembang menghalalkan ketidak merataan pendapatan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dasar-dasar argumen ekonomi yang menghalalkan ketidak merataan pendapatan adalah bahwa pendapatan per-orangan dari perusahaan yang tinggi merupakan kondisi yang diperlukan bagi perkembangan dan dengan demikian memungkinkan adanya investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme model Harrod-Domard, yaitu andaikata si kaya menabung dan menginvestasikan sebahagian pendapatannya untuk barang-barang konsumsi dan laju pertumbuhan GNP langsung berkaitan dengan proporsi pendapatan nasional yang ditabung, maka perekonomian akan ditandai oleh distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Hal ini memungkinkan terjadinya tabungan yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Tetapi ketidak merataan pendapatan tidak mengandung arti bahwa tabungan lebih besar. Dalam kenyataan-

nya, menabung hanya dapat dilakukan oleh 3-5 persen penduduk yang berada pada puncak piramida (Jhingan, 1975 dan Guritno, 1988: 425). Hal ini antara lain karena orang-orang kaya di negara sedang berkembang tidak dapat diharapkan kemampuannya dalam menabung dan menginvestasikan pendapatan mereka dalam perekonomian setempat. Malahan para tuan tanah, pedagang, politisi dan golongan elit kaya lainnya membelanjakan pendapatannya untuk barang-barang impor mewah, rumah-rumah mahal, bepergian ke luar negeri dan menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas, perhiasan, batu permata, perumahan, uang asing dan rekening pada bank-bank asing dan lain sebagainya. Ini memperkecil investasi nyata dan laju pertumbuhan modal menjadi rendah. Dengan demikian adanya ketimpangan yang tajam di dalam distribusi pendapatan, membuat laju pembentukan modal tetap rendah.

F. Kekurangan Peralatan Modal

Laju pembentukan modal juga tetap rendah karena peralatan modal kurang. Tidak hanya persediaan modal, tetapi bahkan modalnya juga kurang. Menurut Jhingan (1975) dalam Guritno (1988: 424) Keseluruhan investasi modal di negara-negara sedang berkembang hanya sebesar 5 sampai 6 persen dari pendapatan nasional, sedangkan di negara maju jumlahnya sampai 15-20 persen. Disebabkan oleh kelangkaan modal tersebut, maka menjadi tidak mungkin negara-negara sedang berkembang untuk mengganti peralatan modal yang ada dan bahkan untuk menutup penyusutanpun ne

gara berkembang tidak mampu. Akibatnya laju pembentukan modal tetap rendah.

G. Pasar Sempit.

Pasar yang sempit merupakan alasan lain penyebab rendahnya laju pembentukan modal. Salah satu ciri umum negara sedang berkembang adalah standar hidup yang rendah. Kebenaran dari fakta ini bukan saja dalam hubungan dengan rekan imbang (counternart) mereka di negara-negara kaya, namun juga dalam hubungannya dengan golongan elit dalam mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut antara lain dimanifestasikan secara kuantitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan). Pendapatan yang rendah menyebabkan tenaga beli masyarakat rendah menyebabkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak terjual. Dengan demikian sempitnya pasar akan menghalangi investasi, karena pasar domestik mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menyerap penawaran suatu produk baru. Ini akan membuat pembentukan modal tetap rendah.

H. Kekurangan Lembaga Keuangan.

Alasan lain rendahnya laju pembentukan modal adalah kurangnya lembaga keuangan untuk menyerap dana untuk investasi. Untuk tujuan-tujuan produktif diperlukan pengeluaran modal yang cukup besar. Tetapi ini menjadi tidak mungkin karena kurang berkembangnya pasar uang, pa-

sar modal, lembaga kredit dan bank. Akibatnya adalah tidak dapat dilakukan pengerahan dana tabungan dalam jumlah cukup untuk tujuan investasi dan dengan begitu laju pembentukan modal tetap rendah.

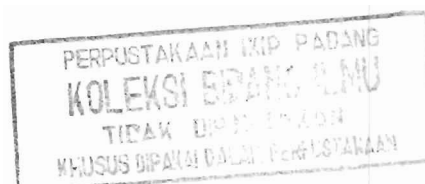
I. Keterbelakangan Ekonomi

Keterbelakangan ekonomi juga merupakan penyebab dari rendahnya laju pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang. Efisiensi buruh yang rendah, faktor-faktor produksi yang tidak mobile, kurang spesialisasi dalam pekerjaan dan aktivitas berusaha yang terbatas, ekonomi yang terkebangkalan, nilai-nilai serta struktur sosial masyarakat yang masih tradisional, semuanya merupakan kendala untuk menabung dan investasi, dan mencegah naiknya laju pembentukan modal.

J. Kekurangan Dalam Sumber-Sumber Tabungan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa, tingkat pendapatan penduduk di negara-negara sedang berkembang adalah rendah, sedangkan Marginal Propensity to Consumption (MPC) adalah tinggi mengakibatkan laju tabungan sukarela masyarakat sangat rendah.

Sekitar 61 persen penduduk dunia yang hidup di negara sedang berkembang mempunyai pendapatan tahunan yaitu tahun 1973 kurang dari \$ 500 dan kira-kira 30 persen hidup dengan pendapatan kurang dari \$200. Bahkan tabungan minus (dissaving) adalah hal biasa bagi ke-



luarga berpenghasilan rendah di India, Srilangka, Thailand, begitu juga di antara keluarga bekerja di Bombay, Honduras, Inggris dan Filipina (World Bank Atlas, 1975, dan PBB, 1966: 29-30).

Selanjutnya, hasil penyelidikan Chenery dan Syrquin (1975) dalam Sukirno (1985: 350) menunjukkan bahwa pada pendapatan perkapita sebesar US\$100, tabungan masyarakat dan pendapatan pemerintah dari pajak masing-masing adalah 13,5 persen dan 12,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDRB). Sedangkan pada pendapatan per kapita sebesar US\$ 1.000 tabungan masyarakat dan pendapatan pemerintah dari pajak berturut-turut adalah sebesar 23,3% dan 25,4% dari PDRB.

Dari ke dua hasil penyelidikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk menumpuk (pembentukan) modal melalui tabungan adalah rendah baik ditinjau dari segi tabungan sukarela masyarakat maupun tabungan pemerintah.

Selain dari tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah, sumber tabungan yang lain adalah tabungan bisnis dan perusahaan. Tabungan ini biasanya dalam bentuk keuntungan yang didistribusikan dan yang tidak didistribusikan. Biasanya di negara-negara sedang berkembang, kelas-kelas penghasil keuntungan karena mempunyai ambisi kekuasaan, menabung lebih banyak dalam usaha-usaha yang produktif. Mereka ini merupakan sumber penting pembentukan modal di sektor pertanian dan industri. Tetapi mereka kurang yakin terhadap jaminan investasi jangka panjang sebagai akibat kecondongan sosialis se-

bagian besar negara sedang berkembang.

Ada 2 masalah yang ditemui dalam pembentukan modal melalui tabungan swasta domestik adalah:

1. Masalah dalam meningkatkan tabungan bisnis dan dalam penggunaan tabungan itu secara efektif.
2. Masalah dalam merangsang individu agar menabung lebih banyak dan membiarkan tabungan tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi yang mendorong pertumbuhan.

K. Keterbelakangan Teknologi

Keterbelakangan teknologi juga menghalangi pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang. Menurut Jhingan (1975) dalam Guritno (1988: 34) semua negara sedang berkembang juga berada pada tingkat teknologi yang tidak efisien. Keterbelakangan teknologi itu dapat dilihat dari hal berikut:

1. Pada ongkos produksi rata-rata yang tinggi meski upah buruh rendah.
2. Pada tingginya rasio buruh-output dan modal-output. Pada umumnya faktor harga yang konstan mencerminkan produktifitas buruh dan modal yang rendah.
3. Pada besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.
4. Pada besarnya jumlah barang-barang modal untuk menghasilkan suatu output nasional.

Keterbelakang teknologi itu sebenarnya disebabkan oleh adanya dualisme teknologi yaitu penggunaan ber-

bagai fungsi produksi sekaligus dalam sektor ekonomi maju dan sektor ekonomi yang tradisional. Adanya dualisme teknologi ini akan menghalangi pembentukan modal, terutama akibat dari penggunaan teknologi tradisional dalam produksi. Sebagai akibat dari teknologi produksi yang tradisional, maka produktifitas per unit buruh dan produktifitas per unit modal tetap rendah. Hal ini akan menyebabkan tingkat output dan pendapatan nasional tetap rendah dan laju pembentukan modal tidak dapat meningkat.

L. Demonstration Effect

Adanya demonstration effect, juga menghambat pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang. Menurut Nurkse, salah satu alasan penting dari rendahnya laju pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang adalah demonstration effect.

Demonstration effect merupakan suatu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju, yang pada hakekatnya adalah masyarakat dengan sektor industri yang sudah sangat maju, memungkinkan penduduk di negara-negara berkembang mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang industri yang mutunya jauh lebih baik dari pada yang dapat dihasilkan di dalam negeri.

Adanya demonstration effect tersebut, akan berpengaruh buruk pada kecenderungan menabung (propensity to save) di negara-negara sedang berkembang. Begitu orang berkenalan dengan pola konsumsi negara maju, pengeluaran mereka untuk konsumsi mewah meningkat seiring dengan kemajuan yang sudah surut untuk menabung. Kenaikan tingkat ab-

solut pendapatan nyata di negara-negara sedang berkembang ini menyebabkan fungsi konsumsi bergeser ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di samping itu adanya demonstration effect, tidak hanya berpengaruh buruk pada kecenderungan menabung, tetapi juga mempersulit pemerintah dalam mempergunakan keuangan negara sebagai sarana pembentukan modal.

M. Anggaran Belanja Defisit

Salah satu sumber utama pembentukan modal adalah berupa anggaran belanja defisit. Meskipun anggaran belanja defisit ini merupakan sumber pembentukan modal, dia juga dapat menjadi penghambat pembentukan modal yaitu apabila defisit tersebut melampaui batas keselamatan maka dia cenderung menurunkan laju pembentukan modal. Hal ini terjadi apabila anggaran defisit menjurus ke situasi inflasioner.

Apabila harga naik, barang-barang menjadi lebih mahal. Akibatnya konsumen dipaksa untuk membelanjakan bagian pendapatannya yang lebih besar dan dengan demikian mempersulit dirinya untuk menabung. Ini menghalangi pembentukan modal.

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA MODAL-OUTPUT

Bagaimanakah hubungan fungsional antara tabungan dan penanaman modal (investasi) disatu pihak dan kenaikan pendapatan dilain pihak? Berapa jumlah penanaman modal yang dibutuhkan supaya pendapatan bertambah dengan tingkat tertentu?. Jawaban terhadap pertanyaan serupa ini dapat dicari dengan memakai pengertian perbandingan modal-output (Capital Output Ratio).

A. Pengertian

Perbandingan modal output (Capital Output Ratio) atau disingkat dengan COR menunjukkan hubungan antara nilai penanaman modal (investasi) dan nilai output. Ia merupakan satu angka perbandingan yang menunjukkan berapa jumlah kesatuan modal (capital units) yang dibutuhkan supaya produksi dan pendapatan bertambah dengan satu unit (Djojohadikusumo, 1955: 99).

Bila perbandingan antara modal-output dalam ekonomi dikatakan 5:1, ini berarti bahwa diperlukan penanaman modal sebesar Rp.5 untuk menghasilkan output (pendapatan) senilai Rp. 1,.

B. Macam-macam Bentuk Capital Output Ratio

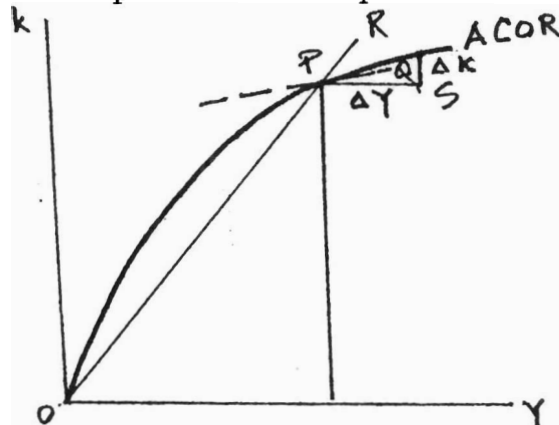
Capital output ratio dapat dibedakan atas dua macam sebagai berikut:

1. Perbandingan modal-output rata-rata (Average Capital Output Ratio) atau disingkat dengan ACOR. ACOR me-

nunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dan arus output lancar yang dihasilkan. Dengan kata lain ACOR menunjukkan segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dan pada keseluruhan pendapatan.

2. Perbandingan modal-output marginal atau inkremental (Incremental Capital Output Ratio) disingkat dengan ICOR. ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output (pendapatan) ΔY , yang dihasilkan dari kenaikan tertentu pada persediaan modal ΔK . Ini dapat dinyatakan sebagai $\Delta K/\Delta Y$.

Selanjutnya istilah perbandingan modal-output dalam ilmu ekonomi berkaitan dengan perbandingan modal-output inkremental (ICOR) atau marginal. Perbandingan ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 yang menunjukkan pada satu periode waktu. Untuk lebih jelasnya tentang ACOR dan ICOR dapat dilihat pada kurva di bawah ini:



Pada kurva di atas, jumlah output (Y) digambarkan pada sumbu horizontal, sedangkan pada sumbu vertikal adalah jumlah modal (k). Dalam kurva di atas ACOR digambarkan oleh garis lengkung dari titik asal (origin)

ke fungsi yang menghubungkan modal dengan output total. Pada kurva OPQ adalah fungsi seperti itu dan OR adalah garis lurus yang menembusnya pada titik P sehingga ACOR nya sama dengan PY/OY . ICOR diukur oleh slope dari tangen yang ditarik pada fungsi tersebut di titik P. Jadi ICOR sama dengan $RS/PS (= \Delta P / \Delta Y)$.

Hubungan antara modal dari pendapatan seperti yang tersebut di atas, juga dapat ditinjau dari sudut yang sebaliknya yaitu dalam arti produktif modal.

Contoh : Kalau COR adalah 4, berarti bahwa koefisien produktif modal adalah 0,25. Hal ini berarti bahwa tambahan satu unit modal berhasil menaikkan pendapatan dengan 0,25 unit. Dalam produktif modal, tambahan modal adalah yang dipakai sebagai pangkalan. Makin rendah angka COR, makin baik keadaannya oleh karena produktif modal juga makin besar atau tidak begitu banyak jumlah modal yang dibutuhkan untuk memperoleh kenaikan pendapatan.

C. COR Di Negara Sedang Berkembang.

Berbagai perkiraan mengenai COR telah dibuat di Negara sedang berkembang. Sekelompok ahli yang ditunjuk oleh PBB menggunakan perbandingan yang bergerak dari 2:1 sampai 5:1. Rosenstien-Rodan memperkirakan bahwa perbandingan tersebut sekurang-kurangnya 3 : 1 dan 4 : 1 (Meier dan Baldwin, 1960: 340). Sementara itu COR di Indonesia terletak pada tingkatan 4 : 1 (Djojohadikusumo, 1955: 102). Dan menurut (Lewis, 1966: 340) COR di ne-

gara sedang berkembang terletak antara 3 : 1 dan 4 : 1.

D. Faktor-Faktor Yang Menentukan COR.

Besarnya COR pada suatu perekonomian tidak hanya tergantung pada jumlah modal yang dipergunakan, tetapi juga pada faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

1. Sifat kemajuan teknologi.
2. Efisiensi penanganan jenis peralatan modal baru.
3. Mutu keterampilan manajerial dan organisasional.
4. Komposisi investasi.
5. Pola permintaan.
6. Hubungan harga faktor.
7. Seberapa luas penggunaan overhead sosial dan ekonomi serta dampak industrialisasi.
8. Pendidikan dan perdagangan luar negeri pada perekonomian.

Perbandingan modal-output (Capital Output Ratio) disingkat dengan COR, memberikan hasil yang lebih berarti dalam jangka panjang ketimbang dalam jangka pendek yang secara nalitis, COR berguna dalam menarik perhatian akan arti penting modal di dalam pembangunan ekonomi.

BAB V

P E N U T U P

Dalam dua dasawarsa belakangan ini, para ahli ekonomi dan para pelaksana pembangunan tetap yakin bahwa modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan kepada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan, sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembentukan modal.

Pembentukan modal adalah dimana masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih baik dimasa depan. Jadi pembentukan modal terjadi jika sebagian dari pendapatannya ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan untuk memperbesar jumlah output dikemudian hari.

Peranan istimewa dari modal dalam pembangunan adalah; dapat menciptakan pasar, membuat pembangunan menjadi mungkin untuk dilaksanakan, merupakan salah satu cara pemecahan pokok kesulitan dalam neraca pembayaran, dan dapat mempercepat proses pembangunan nasional.

Menurut asalnya, pembentukan modal itu dapat dibedakan atas 2 sumber yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri antara lain bersumber dari tabungan, pembentukan modal melalui kebijaksanaan fiskal, pembentukan modal melalui kebijaksanaan anggaran belanja defisit, pengangguran tak

kentara, pembentukan modal manusia, melalui inflasi dan dari keuntungan badan usaha negara. Sedangkan sumber pembentukan modal yang berasal dari luar negeri antara lain dalam bentuk bantuan luar negeri, pinjaman swasta, penanaman modal asing swasta dan pinjaman ekspor.

Di negara-negara sedang tingkat pertumbuhan modal umumnya rendah, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat dalam pembentukan modal yaitu: Terdapatnya lingkaran perangkap kemiskinan, kekurangan tenaga wiraswasta, masalah kependudukan, kekurangan overhead ekonomi, tidak meratanya distribusi pendapatan, kekurangan peralatan modal, pasar terbatas, kekurangan lembaga keuangan, keterbelakangan ekonomi, kekurangan dalam sumber-sumber tabungan, keterbelakangan teknologi, demonstration effect dan anggaran belanja defisit.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa jumlah penanaman modal yang dibutuhkan supaya pendapatan bertambah dengan tingkat tertentu, dan hubungan antara tabungan dengan investasi (penanaman modal) maka perlu ditinjau perbandingan modal-output (COR) yang ada di negara tersebut. Hal ini berguna dalam menarik perhatian akan arti penting modal di dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagwati, J dan R. S. Eckaus, 1970. Foreign Aid. Penguin, Harmondsworth.
- Chenery, H. B dan M. Syrquin, 1975. Pattern of Development, dalam Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan Oleh Sadono Sukirno. Pen. Fekon UI, Jakarta.
- Djajohadikusumo, Sumitro, 1955. Ekonomi Pembangunan. PT. Pembangunan Djakarta, Djakarta.
- Jhingan, M.L, 1975. The Economic of Development and Planning, diterjemahkan Oleh D. Guritno. Pen. CV Rajawali, Jakarta.
- Lewis, W.A, 1966. Development Planning. Allen & Unwin, London.
- Meir, G. M dan R.E. Baldwin, 1960. Economic Development: Theory, History, Policy. John Wiley, New York
- Nurkse, R, 1953. Problems of Capital Formation In Underdeveloped Countries. Basic Black Weel, Oxford.
- Roeke, Joechen, 1978. Kewiraswastaan dan Perkembangan Ekonomi Indonesia, dalam Wiraswasta dan Kewiraswastaan (Manan -ed). Jurusan PDU FPIPS IKIP Padang.
- Sukirno, Sadono, 1985. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Pen. Lembaga Penerbit Fekon UI, Jakarta.
- Todaro, Michael. P, 1985. Economic Development in The Third World, 3rd edition, terjemahan Abdullah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
-